

SKRIPSI

ANALISIS SIKAP POLITIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAN PENYERAPAN ASPIRASI DI KABUPATEN BANTUL

KIKI RISKI NABELA

20110520090

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Unit analisa data dengan menggunakan wawancara dengan beberapa narasumber dan lokasi penelitian di Komisi D DPRD Bantul. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan juga menarik kesimpulan dari hasil wawancara.

Hasil penelitian diperoleh dari hasil wawancara mengenai bagaimana sikap politik anggota dewan Bantul dalam menerima, merespon, menghargai dan bertanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat Bantul yang telah tertampung. Dalam menerima, merespon, menghargai dan bertanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat anggota DPRD Bantul harus mengerti dengan jelas apa yang menjadi keinginan dari masyarakat sehingga menuntut anggota dewan untuk mempunyai pengetahuan luas demi tercapainya keinginan bersama untuk membangun daerah Bantul menjadi lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap politik anggota DPRD seperti faktor eksternal yaitu Undang-undang dan Anggaran yang mana sangat berpengaruh penting dalam merealisasikan aspirasi masyarakat Bantul.

Kata kunci : DPRD, Menerima, merespon, menghargai, bertanggungjawab, aspirasi, undang-undang, anggaran dan sikap politik.

KIKI RISKI NABELA  
20110520090

ANALISIS SIKAP POLITIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PENYERAPAN  
ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL

## **A. Latar Belakang**

Kewajiban dan tugas anggota DPRD seperti tercantum dalam UU No 32 tahun 2004 pasal 45 tentang kewajiban DPRD adalah melayani masyarakat. Kedudukan serta adanya DPRD sangat berpengaruh dan penting sekali bagi lajunya perkembangan suatu daerah dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat banyak di dalamnya guna mewujudkan suatu kebijakan yang saling terpadu untuk melaksanakan kewajiban bersama. Salah satu tugas pokok, fungsi maupun wewenang anggota DPRD juga adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Kemampuan DPRD dalam menjalankan tugas pokok, fungsi maupun wewenang anggota DPRD, dapat menunjukkan kinerja anggota DPRD itu sendiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam perubahan suatu daerah. Akan tetapi, realitas pelaksanaan fungsi DPRD tersebut kadangkala tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga ketidakpahaman anggota dewan akan tugas mereka yang sering diperlihatkan kebanyakan di acara televisi. Keberadaan fungsi pengawasan hanya dijadikan alat untuk menyoroiti kesalahan eksekutif bukan pada peran untuk membantu eksekutif untuk menjalankan tugas pemerintah sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat 1 UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Salah satu fungsi dewan

yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan ( Robinson Tarigan, 2006).

Menerima, menampung serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat sangatlah memerlukan pengetahuan yang luas agar mengerti, memahami serta dapat memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Apabila fungsi pengawasan tersebut tidak berjalan secara optimal, akan terlihat bahwa adanya kelemahan dari pihak Internal yaitu anggota dewan itu sendiri. Terkadang kondisi ini tidak menjadi perhatian penting bagi anggota DPRD karena kurangnya perhatian khusus dalam menerima maupun mencerna aspirasi masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah. Untuk memahami keinginan masyarakat, anggota dewan dituntut untuk mempunyai pengetahuan tinggi yang berhubungan dengan pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan itu sendiri. Sehingga memudahkan anggota DPRD untuk mengerti apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Bahan dan metode penelitian sudah menjadi tradisi yang harus di pakai dalam penelitian. dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif karena dengan metode kualitatif dapat menjelaskan dengan rinci permasalahan yang terjadi di Kantor DPRD Bantul dalam menerima, merespon, menghargai dan bertanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penggunaan metode ini diharapkan untuk lebih membantu dalam menjelaskan secara detail inti permasalahan yang terjadi.

Tujuan penggunaan metode kualitatif ini untuk menemukan fakta yang jelas (Kiki Listari, 2013, 33).

## **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kantor DPRD Bantul. Pada kantor DPRD Bantul penulis mewawancarai Komisi D DPRD Bantul.

## **D. Unit Analisis**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dimaksud dengan unit analisis adalah yang mana objek yang dijadikan narasumber. Narasumber disini yaitu ketua Komisi D dan juga anggota-anggota komisi D.

## **E. Sumber Data**

Pada sumber data, data yang diperoleh oleh penulis yaitu melalui :

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang terkait dengan penelitian ini dan

mampu memberikan informasi serta yang berisi tentang variabel penelitian, data ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi (Dian Eka Rahmawati, 2010). Peneliti melakukan wawancara kepada 9 orang anggota DPRD khususnya pada bagian Komisi D DPRD Bantul.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data hasil kutipan yang diperoleh dari sumber lain atau tidak diperoleh dari informan secara langsung berupa arsip-arsip, surat kabar, majalah, buku, dokumen-dokumen atau arsip-arsip, foto maupun video yang memiliki data tentang variabel penelitian (Dian Eka Rahmawati, 2010).

## **F. Teknik pengumpulan data**

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara langsung mengenai keadaan konsep didalam unit analisa yang menjadi objek penelitian. Dan mengungkapkan fenomena-fenomena yang *real* (nyata) terjadi didalam unit analisa dengan cara peneliti terlibat langsung kepada situasi yang terjadi didalam unit analisa itu sendiri (Dian Eka Rahmawati, 2010).

### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi atau pembicaraan secara langsung terhadap

informan yang dituju, dan peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penelitian secara mendalam untuk mendapatkan data dan informasi yang diinginkan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari dari sumber referensi-referensi seperti dokumen, catatan, karya tulis ilmiah yang terkait dengan keadaan konsep penelitian didalam bagian analisa dan terkait dengan objek penelitian. Sehingga dapat dikembangkan oleh peneliti untuk menggambarkan objek yang akan diteliti (Dian Eka Rahmawati, 2010).

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dapat ditarik kesimpulan diatas, teknik analisa data adalah mengorganisasikan data-data yang didapat dari hasil penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang dihasilkan dari wawancara terhadap informan dan pengamatan/observasi. Selanjutnya peneliti menganalisa, menggabungkan atau menyederhanakan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi didalam unit analisis dengan pemikiran yang logis dan metodologi terkait dari semua data yang didapatkan dari naskah wawancara, observasi/pengamatan, dokumentasi, resmi, catatan lapangan dan lainnya.

1. Merumuskan berbagai macam kategori fenomena sosial yang disajikan sesuai dengan data yang ada.
2. Mengabstraksikan tema-tema fenomena sosial yang bersifat induktif
3. Melakukan interpretasi data (Dian Eka Rahmawati, 2010). Dengan adanya pengertian di atas maka dapat diartikan bahwa teknik analisa data adalah bagaimana cara mengelolah data yang sudah ada dan diurutkan sesuai dengan data yang tersedia.

## **H. Pembahasan**

### **ANALISIS SIKAP POLITIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PENYERAPAN ASPIRASI DI KABUPATEN BANTUL**

Kualitas kinerja seseorang dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang tempuh. Hal inilah yang terkadang membuat masyarakat bertanya-tanya apakah latar belakang pendidikan anggota dewan berpengaruh penting dalam kualitas kinerja mereka dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Pendidikan juga dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengukur kinerja DPRD dalam menyerap, menampung, merespon dan bertanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat. Pengukurannya secara kelembagaan bisa saja dilihat secara nyata dari pelaksanaan atas hak, fungsi serta wewenang, namun tidak semudah itu melakukannya. Oleh karena itu, untuk melihat dan menilai kualitas kinerja anggota dewan Bantul dalam menyerap aspirasi masyarakat penulis akan membagi pembahasan menjadi dua bagian, pertama dilihat dari beberapa indikator kinerja DPRD Kabupaten Bantul dalam menyerap, menampung,

merespon maupun menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut, dan kedua penulis juga akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD kabupaten Bantul dalam menyerap, menampung, merespon dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

### **1. Indikator Sikap Politik Anggota DPRD Bantul dalam Menyerap, Menampung, Merespon dan Bertanggungjawab Apirasi Masyarakat.**

Kualitas kinerja anggota dewan Bantul dengan peran yang dimilikinya memiliki nilai yang sangat penting. Untuk melakukan penilaian terhadap kualitas kinerja tersebut peneliti juga harus mempunyai indikator baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dalam pengukuran kualitas kinerja anggota dewan tersebut. Dalam penilaian ini penulis akan melakukan penilaian melalui kualitatif. Pada penjelasan ini indikator menggambarkan bagaimana proses penyerapan aspirasi masyarakat tersebut diterima lalu kemudian diproses untuk direalisasikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator yang digunakan dalam penelitian terhadap kualitas kinerja Anggota Dewan Bantul dalam menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat adalah Sikap Politik, diukur dari bagaimana sikap anggota dewan tersebut dalam Menerima, Merespon, Menghargai, dan Bertanggung jawab. Kinerja, diukur sejauh mana pelayanan yang telah diberikan oleh anggota dewan tersebut apakah sudah tepat waktu dan



berkualitas, apakah tingkat keterampilan sudah sesuai dengan bidang pendidikan yang telah dilewati anggota dewan tersebut dan adakah keterlambatan dalam menyerap aspirasi masyarakat. DPRD, diukur dengan menganalisa dari hasil wawancara apakah DPRD sudah menjadi perantara yang baik di masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Pendidikan apakah background pendidikan telah berperan penting dalam kualitas kinerja mereka dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Dalam indikator ini penulis akan analisis kualitas kinerja anggota DPRD diukur dari bagaimana cara anggota dewan dalam menerima aspirasi masyarakat sesuai dengan kewajiban anggota DPRD Bantul.

Bentuk pertanggungjawaban langsung anggota DPRD dalam menerima aspirasi masyarakat, biasanya dilakukan dalam aktifitas reses dengan tujuan langsung melakukan dialog interaktif dengan masyarakat. Pada indikator ini akan diukur dari adakah sikap tanggungjawab yang diperlihatkan oleh anggota dewan setelah mendengar aspirasi masyarakat dan tindakan apa yang langsung diambil oleh anggota dewan tersebut setelah mengetahui apa keinginan masyarakat. Dalam menerima, merespon dan juga bertanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat anggota dewan Bantul pun memberikan sikap yang bijak dalam menerima aspirasi masyarakat.

Dalam penyerapan aspirasi masyarakat anggota dewan DPRD Bantul juga memiliki faktor yang mempengaruhi yaitu Pada indikator ini peneliti menemukan hasil dari data wawancara bahwa faktor yang

mempengaruhi anggota dewan penyerapan aspirasi adalah pada Undang-undang dan Anggaran. Pada undang-undang, sebelum aspirasi tersebut setuju untuk direalisasikan maka aspirasi tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu dengan undang-undang yang berlaku begitu pula dengan anggaran. Jika aspirasi masyarakat tersebut sudah sesuai dengan undang-undang tetapi anggaran yang tersedia tidak dapat memfasilitasi aspirasi tersebut maka aspirasi tersebut juga tidak bisa untuk direalisasikan. Dengan demikian terkadang terjadi perbedaan pendapat dari anggota dewan Bantul dengan Masyarakat karenan terkadang masyarakat sebagian tidak mengerti bagaimana sistematika dari penyerapan dan realisasi terhadap aspirasi masyarakat tersebut tetapi dengan semaksimal mungkin anggota dewan Bantul menjelaskan bagaimana proses penyerapan aspirasi tersebut.

## **I. Kesimpulan**

1. Sikap politik yang ditunjukkan oleh anggota DPRD Bantul dalam menerima, merespon, menghargai dan juga bertanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat yang telah tertampung di Kantor DPRD Bantul maupun aspirasi yang disampaikan secara langsung melalui anggota dewan Bantul sudah cukup baik karena pada saat menerima, merespon, menghargai maupun bertanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat anggota dewan Bantul sudah bersikap dengan baik dan juga bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Dalam

bertanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat dapat dilihat dari hubungan kerjasama antara masyarakat dan juga anggota dewan yang masih berhubungan dengan baik. Akan tetapi, walaupun anggota DPRD sudah bertindak dengan benar dalam menerima aspirasi masyarakat anggota dewan Bantul juga sedikit tertutup dalam menyampaikan informasi karena adanya anggota dewan yang tidak bersedia diwawancarai.

2. Dalam kerja seseorang dituntut dengan prestasi yang baik begitu pula dengan kinerja anggota dewan Bantul yang setiap harinya menjadi sorotan masyarakat yang mempertanyakan bagaimana kinerja anggota dewan Bantul, apakah sudah sesuai dengan kewajiban ? Maka dengan adanya penelitian dari peneliti, peneliti dapat mengetahui dan menjelaskan dari hasil wawancara maupun data yang didapatkan dari narasumber-nasumber yang terpercaya yaitu anggota Komisi D DPRD Bantul. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja anggota dewan Bantul dalam penyerapan aspirasi masyarakat sudah optimal sesuai dengan hasil pengukuran yang peneliti gunakan melalui teori-teori yang ada dan juga kinerja anggota dewan Bantul dalam menyerap, menerima, merespon dan bertanggungjawab terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku sekaligus sesuai dengan Anggaran yang ada. Dalam penyerapan aspirasi masyarakat Bantul, DPRD Bantul telah mengupayakan dengan optimal untuk penjangkaran aspirasi-aspirasi yang

telah tersalurkan dan kemudian direalisasikan. Dalam menerima, merespon, menghargai sampai dengan bertanggungjawab atas aspirasi masyarakat yang telah tersalurkan maka DPRD sudah menjalankan dengan baik sesuai dengan aspek-aspek indikator yang peneliti teliti, akan tetapi diakui oleh beberapa anggota dewan Komisi D Bantul bahwa pendidikan sangat penting bagi keberhasilan kerja anggota dewan Bantul, karena dapat dilihat dari saran maupun pendapat yang diajukan oleh anggota dewan tersebut sangat terlihat bahwa adanya perbedaan yang sangat signifikan dari cara penyampaian maupun isi pendapat/ide dari setiap anggota DPRD yang berlatar belakang SMA dan Sarjana. Tapi terdapat juga beberapa dari anggota dewan Komisi D Bantul yang berpendapat bahwa tingkat pendidikan anggota dewan tidaklah berpengaruh terhadap kinerja mereka di keanggotaan karena jika anggota dewan tersebut banyak memiliki pengalaman dibidang yang ditekuninya maka tidak menutup kemungkinan kinerja anggota dewan yang berlatarbelakang SMA lebih baik daripada anggota dewan yang berlatarbelakang pendidikan Sarjana.

3. Sebagai anggota dewan Bantul, anggota DPRD Bantul sadar bahwa keinginan masyarakat Bantul lebih penting dari keinginan pribadi, maka dari itu dari indikator kinerja yang diwawancara oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada hambatan-hambatan dari luar kedewanan, melainkan hambatan dari Undang-undang dan ketersediaan Anggaran. Karena jika anggota dewan tersebut memaksakan untuk

merealisasikan sedangkan aspirasi masyarakat tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka akan adanya sikap yang sangat ditentang oleh masyarakat yaitu “korupsi”, maka dengan itu anggota dewan Bantul terkadang merasa serba salah, tetapi tetap mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat Bantul. Peneliti juga menemukan fakta bahwa setiap aspirasi-aspirasi masyarakat yang tidak bisa direalisasikan secepatnya bukan berarti aspirasi tersebut ditolak akan tetapi ditangguhkan terlebih dahulu sampai aspirasi masyarakat tersebut sesuai dengan undang-undang dan anggaran. Maka dari itu kesimpulan ini menjelaskan bahwa tidak adanya penolakan terhadap aspirasi-aspirasi yang telah tertampung.

## **J. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas, maka terdapat beberapa saran untuk DPRD Bantul sebagai Perantara masyarakat dalam menyamakan aspirasi di Kabupaten Bantul.

Peranan anggota Dewan Bantul sebagai perantara masyarakat secara pribadi dalam menampung, menyerap, menindaklanjuti aspirasi masyarakat sudah baik, tetapi alangkah baiknya jika standar latarbelakang pendidikan calon anggota dewan disetarakan dengan yang berlatarbelakang Sarjana, karena menurut saya seseorang yang memiliki latarbelakang diatas Sekolah Tinggi Menengah setidaknya sudah banyak informasi-informasi yang didapat mengenai bidangnya di kedewanan sehingga memudahkan anggota dewan

tersebut dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang, tetapi tidak menutup kemungkinan pula bahwa calon anggota dewan harus memiliki skill dan harus memiliki pengalaman yang cukup banyak untuk mengerti apa yang akan dilakukan di kedewanan. Karena menurut saya, pengalaman juga berperan penting bagi anggota dewan.

## **K. Daftar Pustaka**

- Andea, Friar Gar. 2013. *Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Universitas Sam Ratulangi.
- Listari, Kiki. 2011. *Strategi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam Upaya Promosi Pariwisata*. Skripsi jurusan Ilmu Pemerintahan: Fisipol Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
- Nurani Afiari, Nina. 2012. *Analisi Sikap Politik DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2010 Terhadap RUUK Daerah Istimewa Jogjakarta*, Universitas Muhamadiyah Jogjakarta.
- Ps, Djarwanto.1995. *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi*.
- Rahmawati, Dian Eka. 2010. *Diktat Metode Penelitian sosial*, Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
- Tarigan, Robinson.2006. *Jurnal wawasan*.USU
- Tri Rahayu, Septiana. 2012. *Kinerja pelayanan publik pada kantor kecamatan kabupaten bantul (studi kasus pada pelayanan e-ktp)*. Skripsi Ilmu Pemerintahan: Fisipol Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
- Warastuti, D. 2013. *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Yang Terakomodasi dalam APBD Kota Salatiga*. Tesis Universitas Kristen Satya Wacana.
- Prawirosentono, Suyudi (1992), *Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat Membangun Organisasi Kompetitif menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, BPFE, Yogyakarta.

**Lain-lain :**

<https://ilmupemerintahan.wordpress.com/tag/birokrasi-etika-pelayanan-publik/>

<http://www.detikfinance.com>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14853/1/10E00221.pdf>

<http://www.wikipedia.com>

<http://eprints.uny.ac.id/8628/3/bab%20%20-%2008417141012.pdf>

[http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=8020](http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=8020)

“Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 45 Tentang “Keewajiban DPRD”

“Tata tertib DPRD Bantul”

Wawancara bersama Bapak Paidi, S.Ip

Wawancara bersama Bapak H. Supriyono, M.si

Wawancara bersama Bapak Enggar Suryo Jatmiko, SE

Wawancara bersama Bapak Drs. Timbul Hardjana

Wawancara bersama Bapak Sudarmanta

Wawancara bersama Bapak Reshi cahyadi

Wawancara bersama Bapak H. Sigit Nursyam Priyanto, S.Si